



Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Penguatan Desa: Refleksi Praktik Pengalaman Lapangan Mahasiswa di Kabupaten Mandailing Natal

¹Nugraha Andri Afriza, ²Khoirun Rambe, ³Ildan Saleh, ⁴Mawardi, ⁵Syaparuddin Pohan, ⁶Mhd Fadhlan Zainuddin Nst, ⁷Siti Hawa Lbs, ⁸Saidah Lubis

^{1,5,6,7,8}Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
^{2,3,4}Program Studi Manajemen Dakwah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

nugraha_andri@stain-madina.ac.id

Article Info	Abstract
<p>Article History Received: 27th February 2026 Revised: 14th April 2026 Published: 6th May 2026</p> <p>Keywords: Community service, community empowerment, practical field experience;</p>	<p><i>This community service activity was carried out through the Field Experience Practice (PPL) of students from Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal at the Community and Village Empowerment Agency (PMD), Mandailing Natal Regency, from January 12 to February 13, 2026. The community service aimed to support the strengthening of village governance and empowerment through administrative assistance, financial verification, and facilitation of participatory activities. The methods used were a participatory approach and field observation, including data collection on village development in Panyabungan Subdistrict, verification and validation of village treasurer financial data, management of administrative correspondence, and assistance in the preparation of village development documents. The activities were carried out collaboratively with PMD officials and village officials to ensure suitability with field needs. The results showed that the involvement of PPL students contributed to streamlining administrative processes, improving documentation order, and supporting the process of guidance and coordination between village actors. This activity also provided practical experience for students in understanding the dynamics of village governance firsthand. This community service emphasized the importance of synergy between universities and local governments in strengthening village capacity in a sustainable manner.</i></p>

Informasi Artikel	Abstrak
<p>Sejarah Artikel Diterima: 27 Februari 2026 Direvisi: 14 April 2026 Dipublikasi: 6 Mei 2026</p> <p>Kata kunci Pengabdian masyarakat, pemberdayaan masyarakat, praktik pengalaman lapangan;</p>	<p>Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Mandailing Natal pada 12 Januari–13 Februari 2026. Kegiatan ini bertujuan mendukung penguatan tata kelola dan pemberdayaan desa melalui pendampingan administratif dan fasilitasi kegiatan pemerintahan desa. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif melalui observasi lapangan, pendataan desa, verifikasi dan validasi data keuangan bendahara desa, pengelolaan surat administrasi, serta pendampingan penyusunan dokumen pembangunan desa. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa keterlibatan mahasiswa PPL membantu memperlancar proses administrasi, meningkatkan ketertiban dokumentasi, dan mendukung koordinasi antara dinas PMD dan perangkat desa. Secara umum, kegiatan ini memberi manfaat praktis bagi perangkat desa sekaligus memperkaya pengalaman mahasiswa dalam memahami tata kelola pemerintahan desa. Temuan ini menegaskan bahwa sinergi perguruan tinggi</p>

dan pemerintah daerah dapat memperkuat kapasitas desa secara lebih efektif dan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan salah satu fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan (Mahfudz et al., 2022). Dalam konteks Kabupaten Mandailing Natal, penguatan desa menjadi semakin penting karena desa bukan hanya unit administratif, tetapi juga ruang hidup masyarakat yang memegang peran strategis dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Mandailing Natal, wilayah ini memiliki lebih dari 400 desa/kelurahan, dengan capaian berupa meningkatnya ketertiban administrasi pemerintahan desa, pelaksanaan program pembangunan yang semakin terarah, serta mulai menguatnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa. Meski demikian, desa-desa di wilayah ini masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan kapasitas aparatur, belum meratanya kualitas pengelolaan keuangan dan administrasi, serta koordinasi pembangunan yang belum sepenuhnya optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan desa perlu terus dilakukan secara sistematis dan berbasis kebutuhan lapangan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) memiliki peran yang sangat penting sebagai fasilitator, pendamping, dan penguat kapasitas pemerintahan desa. Lembaga ini tidak hanya bertugas pada aspek administratif, tetapi juga pada pembinaan perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan desa, penguatan kelembagaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur desa. Sebagaimana penelitian oleh Suriadi et al. (2024) menegaskan bahwa tata kelola desa perlu diarahkan pada partisipasi masyarakat dan pemberdayaan kelembagaan agar pembangunan tidak berhenti pada output fisik semata, melainkan juga memperkuat daya hidup masyarakat desa. Sejalan dengan itu, Afrianda & Zulherawan (2024) menunjukkan bahwa keberhasilan program pemberdayaan sangat ditentukan oleh konsistensi pembinaan dan kesesuaian intervensi dengan kebutuhan nyata di lapangan. Dengan demikian, keberadaan Dinas PMD menjadi penting dalam menghubungkan kebijakan pembangunan dengan kebutuhan riil masyarakat desa.

Namun demikian, praktik pemberdayaan desa di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Temuan Hidayat et al. (2024) mengemukakan bahwa keterbatasan kapasitas aparatur desa, rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, serta koordinasi yang belum optimal antara pemerintah desa dan pemerintah daerah dapat menghambat efektivitas program. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan dan program pembangunan desa memerlukan pendampingan yang kontekstual, evaluasi berkala, dan strategi yang adaptif agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Dalam konteks Kabupaten Mandailing Natal yang memiliki keragaman sosial, budaya, dan ekonomi, pendekatan pemberdayaan desa perlu disusun secara responsif dan sesuai dengan karakteristik wilayah. Pentingnya penguatan program berbasis kondisi lokal agar hasil pembangunan desa lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan desa tidak cukup hanya melalui regulasi, tetapi juga memerlukan dukungan pendampingan yang berkesinambungan (Fahmi & Husaini, 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, sinergi antara Dinas PMD dan perguruan tinggi menjadi sangat penting dalam mendukung pembinaan desa secara lebih aplikatif. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal di Dinas PMD Kabupaten Mandailing Natal merupakan bentuk pengabdian sekaligus pembelajaran lapangan yang memberi kontribusi pada pendampingan administrasi, pembinaan desa, dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh

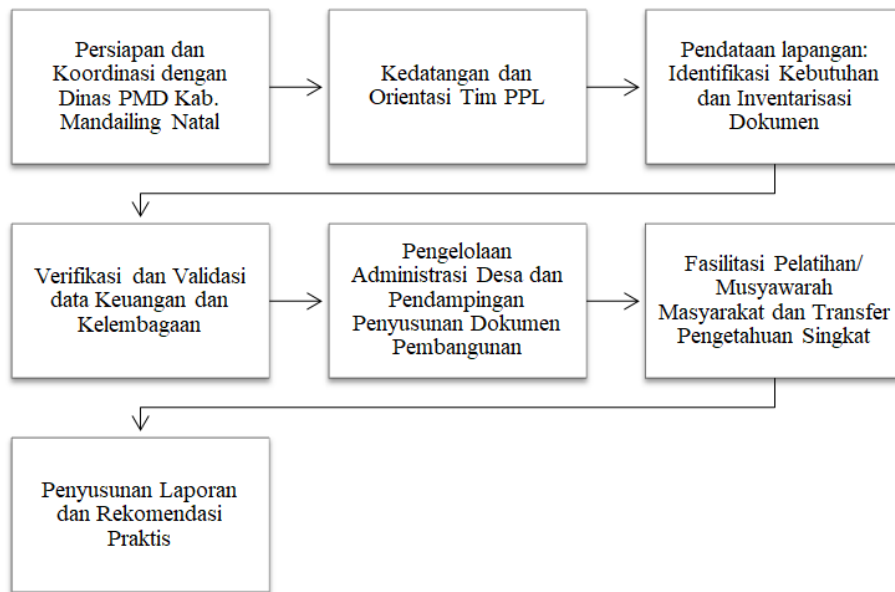
Triparyanto et al. (2022) bahwa keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan lapangan tidak hanya membantu lembaga mitra, tetapi juga memberikan pengalaman praktis yang penting untuk memahami dinamika kerja pemerintahan secara langsung. Oleh karena itu, artikel pengabdian ini bertujuan mendokumentasikan pelaksanaan PPL, hasil yang dicapai, serta implikasinya bagi penguatan tata kelola dan pemberdayaan desa di Kabupaten Mandailing Natal.

METODE

Pengabdian ini merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dengan fokus pada penguatan kapasitas pemerintahan dan masyarakat desa (Zunaidi, 2024). Kegiatan dilaksanakan di wilayah kerja Kecamatan Panyabungan dan sekitarnya dalam koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mandailing Natal. Pelaksana kegiatan terdiri atas tujuh mahasiswa STAIN Mandailing Natal dan satu dosen pembimbing lapangan yang tergabung dalam tim PPL. Tim ini bertugas sebagai pendamping lapangan, enumerator, fasilitator kegiatan, dokumentator, serta penyusun bahan pendukung kegiatan. Pelaksanaan kegiatan berlangsung selama 12 Januari 2026 sampai dengan 13 Februari 2026 sebagai periode inti PPL, sedangkan koordinasi teknis dan penyusunan laporan dilakukan hingga tahap akhir kegiatan.

Metode pelaksanaan menekankan pendekatan partisipatif dan aplikatif agar kegiatan sesuai dengan kebutuhan lapangan. Rangkaian kegiatan meliputi orientasi lapangan, pendataan dalam rangka pembinaan dan pendampingan pemberdayaan desa, pengelolaan serta verifikasi dan validasi data lembaga dan data keuangan desa, termasuk data bendahara desa, pengelolaan surat administrasi desa, serta pendampingan penyusunan dokumen pembangunan desa. Teknik pelaksanaan dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara terstruktur dengan aparatur desa dan bendahara desa, serta verifikasi dokumen administrasi dan pelatihan singkat (Fahmi et al., 2025). Seluruh aktivitas dilaksanakan secara kolaboratif bersama aparatur dinas dan perangkat desa untuk memastikan bahwa setiap intervensi relevan dengan kondisi serta kebutuhan lapangan.

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui beberapa instrumen, yaitu lembar observasi, pedoman wawancara, catatan harian kegiatan, dan dokumentasi hasil kerja. Setiap kegiatan dicatat dalam laporan harian untuk melihat perkembangan pelaksanaan, hambatan, dan tindak lanjut yang diperlukan. Selain itu, dilakukan monitoring melalui pertemuan koordinasi mingguan dengan pihak dinas serta evaluasi akhir untuk menilai capaian kegiatan dan merumuskan rekomendasi praktis. Data lapangan disusun, diverifikasi, dan disimpan dalam format digital maupun hardcopy sebagai bagian dari dokumentasi kegiatan. Seluruh pelaksanaan dilakukan dengan izin kepala desa dan memperhatikan etika pengabdian, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan laporan kegiatan dan rekomendasi tindak lanjut bagi pihak terkait (Zunaidi, 2024).



Gambar 1. Alur Pelaksanaan Pengabdian PPL

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Mandailing Natal menjadi mitra utama pelaksanaan PPL yang dilaksanakan oleh tujuh mahasiswa dan dosen pembimbing lapangan dari STAIN Mandailing Natal di wilayah administrasi Kabupaten Mandailing Natal. Kegiatan pengabdian berlangsung secara terpadu dan berlangsung mulai kedatangan lapangan, pendataan, pendampingan sampai verifikasi administrasi di beberapa kecamatan termasuk Kecamatan Panyabungan. Pada tahap awal, tim PPL melakukan koordinasi administratif, menerima pengarahan dari staf dinas, serta mengikuti orientasi lapangan yang memaparkan tugas, mekanisme pelaporan, dan jadwal kerja harian. Proses administrasi awal dan pembagian tugas menjadi fondasi agar kegiatan di lapangan dapat berjalan terukur dan terarah sesuai alur metodologis yang telah disepakati.



Gambar 2. Kedatangan Mahasiswa PPL di Dinas PMD Kabupaten Mandailing Natal

A. Tahap Pelaksanaan Pengabdian oleh Mahasiswa PPL

Setelah orientasi, pelaksanaan lapangan memasuki fase penempatan dan pembagian tugas di unit-unit kerja yang relevan. Ketujuh mahasiswa ditempatkan pada empat bidang dinas dengan peran yang berbeda, yakni di bidang-bidang berikut:

1. Bidang pendampingan pemberdayaan masyarakat
2. Bidang analisis keuangan daerah
3. Bidang pembangunan desa
4. Bidang pemerintahan desa

Sementara dosen pembimbing lapangan sebagai pembimbing selama pelaksanaan pengabdian PPL berlangsung. Penempatan ini memperhatikan kebutuhan tenaga di masing-masing seksi sehingga ada kombinasi antara tugas administrasi, verifikasi dokumen, dan fasilitasi kegiatan di desa. Pada hari-hari pertama setelah penempatan, setiap anggota tim menyusun jadwal kerja harian dan mingguan bersama pembimbing lapangan untuk menyesuaikan agenda dinas dengan rencana pendampingan di tingkat desa.

Kegiatan pendataan dalam rangka pembinaan dan pendampingan pemberdayaan desa menjadi salah satu aktivitas utama tim PPL selama periode pelaksanaan. Pelaksanaan pendataan dilakukan secara partisipatif bersama perangkat desa, mencakup identifikasi kebutuhan, inventarisasi kelembagaan, serta pendataan potensi ekonomi lokal. Tim PPL menerapkan teknik observasi partisipatif dan wawancara terstruktur, serta mendokumentasikan temuan. Proses pendataan ini dilakukan dengan prinsip verifikasi silang, memeriksa data melalui dokumen desa, wawancara dengan informan kunci, dan diskusi kelompok agar informasi yang terkumpul valid serta bisa menjadi dasar untuk kegiatan pendampingan berikutnya.



Gambar 3. Pendataan Pembinaan dan Pendampingan Desa di Kecamatan Panyabungan

Sebagai bagian dari rangkaian tugas di lapangan, tim juga aktif memfasilitasi kegiatan musyawarah dan pelatihan singkat yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dan kelompok masyarakat. Fasilitasi ini meliputi penyusunan agenda musyawarah, moderasi diskusi, dan penyampaian materi sederhana seputar pengelolaan administrasi desa atau perencanaan partisipatif. Dalam praktiknya, mahasiswa berperan sebagai fasilitator dan dokumentator, memastikan proses musyawarah berjalan inklusif dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Kegiatan fasilitasi tersebut dijalankan berbarengan dengan pendataan sehingga ada kesinambungan antara identifikasi kebutuhan dan tindakan pembinaan di lapangan.

Di bidang pengelolaan keuangan dan analisis keuangan daerah bendahara, kegiatan lapangan menitikberatkan pada verifikasi dan validasi data administrasi keuangan desa serta pembinaan teknis bagi bendahara. Mahasiswa diberi tugas untuk menelaah format laporan,

memeriksa kelengkapan bukti transaksi, dan membantu menyusun daftar perbaikan administrasi yang ditemukan selama verifikasi. Selain itu, terdapat kegiatan pendampingan proses pengajuan pencairan dana desa yang membutuhkan koordinasi intensif dengan pihak terkait. Pelaksanaan tugas ini menuntut ketelitian administratif dan pemahaman prosedur keuangan desa agar sistem pelaporan dan akuntabilitas dapat dipenuhi sesuai ketentuan.



Gambar 4. Verifikasi dan Validasi Data Keuangan Desa, Lembaga, dan Administrasi Desa

Pada aspek administrasi pemerintahan desa, tim PPL menjalankan tugas pemeriksaan berkas surat-menyurat, validasi data, serta koordinasi antar pihak ketika proses perizinan atau pendaftaran operasional diperlukan. Aktivitas ini melibatkan komunikasi aktif dengan perangkat desa, pengecekan syarat administrasi, serta pengarsipan dokumen yang masuk ke dinas. Secara praktik, mahasiswa membantu memperlancar alur administrasi internal dinas dengan mendistribusikan surat ke bidang terkait dan memastikan setiap dokumen tercatat secara sistematis. Kegiatan administrasi tersebut memberikan pengalaman langsung tentang pentingnya prosedur kerja yang rapi dan kecepatan respons dalam pelayanan publik desa.

Selama seluruh periode pelaksanaan PPL, tim menjaga mekanisme koordinasi internal melalui pertemuan rutin dengan pembimbing dinas serta catatan harian kegiatan. Setiap hari kerja dilengkapi laporan singkat yang mencatat kegiatan pendampingan, jumlah desa yang dikunjungi, serta daftar dokumen yang diverifikasi. Selain itu, tim melakukan sinkronisasi jadwal antara kegiatan di kantor dinas dan agenda di lapangan agar tidak terjadi tumpang tindih. Pendekatan kolaboratif antara mahasiswa, staf dinas, dan perangkat desa menjadi kunci dalam pelaksanaan kegiatan agar setiap tahapan, mulai dari pendataan, verifikasi, fasilitasi, hingga administrasi dapat terlaksana secara berurutan dan sesuai dengan alur yang telah ditetapkan.

B. Tantangan dan Manfaat dari Pelaksanaan

Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan ini dilaksanakan bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di wilayah administrasi Kabupaten Mandailing Natal, dengan penempatan mahasiswa pada beberapa seksi berbeda dalam dinas. Dalam praktiknya tim PPL menghadapi tantangan yang bersifat multidimensi, meliputi teknis administratif, logistik lapangan, hingga adaptasi organisasi. Penempatan pada empat bidang menuntut setiap peserta untuk cepat memahami tugas spesifik, menyesuaikan ritme kerja, serta membangun koordinasi intensif dengan staf dinas dan perangkat desa (Fitri, 2025). Untuk mengatasi hal tersebut, tim menerapkan strategi pembagian tugas berbasis bidang, diskusi harian internal, serta koordinasi rutin dengan pembimbing lapangan agar alur kerja tetap terarah. Strategi ini terbukti membantu menjaga konsistensi pelaksanaan kegiatan meskipun terdapat variasi beban kerja antar seksi (Nasrul et al., 2025).

Tantangan geografis dan aksesibilitas menjadi kendala utama dalam kegiatan pendataan dan pembinaan desa, khususnya di wilayah Kecamatan Panyabungan dan desa-desa sekitarnya. Beberapa lokasi membutuhkan waktu tempuh yang cukup lama dengan kondisi infrastruktur jalan yang terbatas. Hal ini mempengaruhi pembangunan dan pengelolaan desa, sebagaimana ditegaskan oleh Kharisma et al. (2021) bahwa kesulitan geografis (*geographic difficulty*) merupakan faktor penting yang memengaruhi pembangunan dan pengelolaan desa. Untuk mengatasi kendala ini, tim PPL menyusun perencanaan rute kunjungan yang efisien, melakukan koordinasi awal dengan perangkat desa sebelum turun ke lapangan, serta memanfaatkan tokoh masyarakat sebagai penghubung dalam proses pengumpulan data. Selain itu, tim juga menerapkan fleksibilitas metode dengan mengombinasikan wawancara langsung dan pengumpulan data tidak langsung ketika kondisi lapangan tidak memungkinkan (Hanjarwati et al., 2021). Berdasarkan pelaksanaan kegiatan, tim berhasil melakukan pendataan dan pendampingan pada sekitar 30 desa, dengan tingkat keterlaksanaan kegiatan yang relatif baik meskipun terdapat keterbatasan akses di beberapa wilayah.

Pada aspek administrasi keuangan dan verifikasi dokumen, tantangan utama terletak pada kebutuhan ketelitian tinggi serta pemahaman terhadap regulasi yang berlaku. Proses verifikasi meliputi pengecekan laporan keuangan, bukti transaksi, serta kelengkapan dokumen administrasi desa. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa mencakup tahapan penting seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang memerlukan ketelitian administratif serta pemahaman prosedur yang baik (Risman et al., 2024). Selain itu, permasalahan dalam administrasi dan pelaporan keuangan desa juga sering muncul akibat keterbatasan kapasitas aparatur dan kompleksitas sistem administrasi yang harus dipenuhi (Susyanti & Utami, 2023).

Untuk mengatasi kendala tersebut, tim PPL melakukan pendampingan langsung kepada aparatur desa, menyusun format sederhana sebagai panduan administrasi, serta melakukan pengecekan berulang untuk memastikan kesesuaian data. Keterbatasan infrastruktur teknologi juga diatasi dengan mengombinasikan pencatatan manual dan digital secara bertahap, mengingat pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya optimal di berbagai wilayah (Herdiana, 2024). Secara kuantitatif, kegiatan ini mencakup verifikasi terhadap sekitar 120 dokumen administrasi dan keuangan desa selama masa pelaksanaan PPL. Salah satu staf dinas PMD menyampaikan bahwa kehadiran mahasiswa cukup membantu mempercepat proses pemeriksaan dokumen yang sebelumnya menumpuk dan belum tertata dengan baik. Hal ini menunjukkan kontribusi nyata kegiatan PPL dalam mendukung peningkatan kinerja administratif dan ketertiban pengelolaan keuangan desa.

Meskipun menghadapi berbagai kendala, pelaksanaan pengabdian ini memberikan manfaat yang signifikan baik bagi mahasiswa maupun instansi mitra. Mahasiswa memperoleh pengalaman praktis dalam pendataan partisipatif, fasilitasi musyawarah, verifikasi administrasi, serta komunikasi lintas lembaga yang tidak sepenuhnya diperoleh dalam pembelajaran di kelas. Dari sisi institusi, keterlibatan tim PPL membantu meringankan beban kerja administratif, meningkatkan ketertiban dokumentasi, serta memperkuat koordinasi antara dinas dan pemerintah desa. Salah seorang perangkat desa di salah satu desa di Kecamatan Panyabungan menyatakan bahwa pendampingan ini membantu aparatur desa lebih memahami cara penyusunan administrasi yang benar dan sesuai aturan. Secara keseluruhan, kegiatan ini menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis praktik dan kolaborasi antaraktor memiliki peran penting dalam memperkuat tata kelola desa, meskipun masih diperlukan penguatan pada aspek sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung.

KESIMPULAN

Berdasarkan rangkaian kegiatan pengabdian oleh tim PPL mahasiswa STAIN Mandailing Natal yang dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa peran aktif Dinas PMD Kabupaten Mandailing Natal sangat menentukan dalam penguatan desa melalui aktivitas pembinaan, pendampingan, verifikasi administrasi, fasilitasi musyawarah, dan pendampingan penyusunan dokumen pembangunan. Pelibatan tujuh mahasiswa dan dosen pendamping lapangan sebagai tenaga pendamping memberikan nilai tambah operasional sekaligus menjadi media pembelajaran praksis yang efektif. Mahasiswa memperoleh keterampilan teknis administrasi dan keuangan, kemampuan fasilitasi, serta pengalaman koordinasi lintas aktor. Pelaksanaan di berbagai seksi memperlihatkan bahwa fungsi koordinasi dan administrasi Dinas berjalan secara terintegrasi meskipun ada variasi kapasitas antar unit.

Sebagai saran praktis yang berangkat dari pengalaman lapangan, disarankan agar perencanaan operasional pengabdian melalui PPL dan program pembinaan desa lebih mempertimbangkan aspek logistik, peta wilayah, serta informasi awal kondisi sosial dan geografis untuk memperlancar pendataan di desa terpencil dalam wilayah Kabupaten Mandailing Natal. Selain itu, perlu memperkuat kapasitas aparatur melalui pelatihan rutin terkait pengelolaan keuangan desa dan pembaruan regulasi, serta menetapkan mekanisme mentoring internal agar pendamping junior mendapat arahan dari staf berpengalaman. Penguatan koordinasi antar bidang, standardisasi format laporan, dan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi untuk pendataan dan pelaporan juga penting untuk mempercepat alur kerja dan meningkatkan akuntabilitas.

PENGHARGAAN

Tim PPL STAIN Mandailing Natal mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Mandailing Natal atas kesempatan, bimbingan, dan kerja sama yang diberikan selama pelaksanaan PPL. Dukungan teknis dan akses lapangan dari pihak Dinas PMD sangat membantu kami memperoleh pengalaman praktis yang bermakna dan menyusun rekomendasi yang aplikatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrianda, R. T., & Zulherawan, M. (2024). Kapasitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 8(1), 95–99. <https://doi.org/10.31604/jim.v8i1.2024.95-99>
- Fahmi, Z., & Husaini, A. (2025). Research Innovation for Sustainable Education Culture (RISE2045) di STAIN Madina: Kolaborasi Riset dan Teknologi Menuju Pendidikan Berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu*, 2(3), 149–157. <https://doi.org/10.69714/mdn7bd53>
- Fahmi, Z., Lestari, N. D., Syihan, N. A., Laily, F. N., Ishaq, I., & Salsabila, T. A. (2025). Implementasi Pendekatan Partisipatif dalam Sosialisasi Pencegahan Leptospirosis: Pengalaman Kelompok 3 KKN Nusantara 2025 di Padukuhan Sayangan, Kulon Progo, DI Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu*, 2(4), 265–272. <https://doi.org/10.69714/31nd5974>
- Fitri, R. A. (2025). Peran Praktik Kerja Lapangan dalam Mendukung Administrasi dan Koordinasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. *Journal of Indonesian Management*, 5(3), 1–8. <https://doi.org/10.53697/jim.v5i3.2909>

- Hanjarwati, A., Suprihatiningrum, J., & Aminah, S. (2021). Survei Aksesibilitas Fisik dan Sosial sebagai Dasar Penyusunan Grand Design Desa Inklusif. *JPPM (Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 8(1), 1–17. <https://doi.org/10.21831/jppm.v8i1.24266>
- Herdiana, D. (2024). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Teknologi Informasi. *JianE (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 6(3), 131–148. <https://doi.org/10.32938/jan.v6i3.8569>
- Hidayat, Y., Permana, O., & Subekti, M. (2024). Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat terhadap Pemberdayaan Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (Studi Deskriptif di Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung). *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 39–47.
- Kharisma, B., Taifur, W. D., & Muharja, F. (2021). Dampak Anggaran, Kesulitan Geografis, dan Rumah Tangga Desa terhadap Status Desa di Provinsi Riau. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 5(3), 187–202. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2021.5.3.187-202>
- Mahfudz, M., Mongkito, A. W., Utomo, A. P., Daswan, L., & Asriani, N. (2022). Program Desa Binaan dalam Rangka Peningkatan Pemahaman Shiroh Ekonomi dan Etika Bisnis Rasulullah. *Abdimas Galuh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 202–209. <https://doi.org/10.25157/ag.v4i1.7010>
- Nasrul, I., Erningsih, E., & Yatim, Y. (2025). Strategi Mahasiswa dalam Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan Kependidikan Mahasiswa Pendidikan Sosiologi. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 9(4), 1983–1987. <https://doi.org/10.31604/jim.v9i4.2025.1983-1987>
- Risman, R., Tasrim, T., Arman, A. F., Asriani, A., & Citrayanti, C. (2024). Pengelolaan Administrasi Keuangan Dana Desa pada Kantor Desa Boneposi. *Jurnal Pabean.*, 6(2), 148–155. <https://doi.org/10.61141/pabean.v6i2.591>
- Suriadi, H., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Yandri, L. (2024). Desentralisasi dan Upaya Peningkatan Otonomi Daerah: menuju Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah*, 18(1), 27–36. <https://doi.org/10.31869/mi.v18i1.4869>
- Susyanti, S., & Utami, T. (2023). Analisis Permasalahan Pengelolaan Keuangan Desa Pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 19(2), 109–122. <https://doi.org/10.21460/jrak.v19i2.8>
- Tripariyanto, A. Y., I, L. D., Komari, A., Wardi, W., Rohman, F., & Mas'ud, M. (2022). Technical Guidance for Pre-UKK Activities (Expertise Competency Test) for Autotronic Vocational Students as One Indicator of Increasing Student Competence. *Abdimas Galuh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 498–506. <https://doi.org/10.25157/ag.v4i1.7213>
- Zunaidi, A. (2024). *Metodologi pengabdian kepada masyarakat: Pendekatan praktis untuk memberdayakan komunitas* (U. S. Hidayatun (ed.)). Yayasan Putra Adi Dharma.